



# Buletin Parlementaria

Nomor 976/II/IX/2017 • September 2017



**Fadli Zon Buka  
Pameran Seni Rupa**

**Putusan PTUN Jadi Landasan  
Pansus Angket KPK  
Hadapi Judicial Review**

**Parlemen Dunia  
Diminta Aktif  
Dalam Pembangunan  
Berkelanjutan**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN

# Parlemen Dunia Diminta Aktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ketua DPR RI Setya Novanto membuka konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center.

**P**erhelatan berlangsung dari tanggal 06 – 07 September ini dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 Parlemen dari berbagai Negara, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care.

“Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen,” ungkap Novanto saat membuka World Parliamentary Forum.

Dengan mengangkat tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development”, forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai

negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

Terkait upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim, Novanto menyerukan agar parlemen dunia aktif dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ia berharap, forum ini memberikan inspirasi bagi Parlemen Dunia agar mampu mengintegrasikan tindakan terkait perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional di negaranya masing-masing.

“Satu yang perlu diperhatikan, penanganan perubahan iklim hendaknya mencerminkan keseimbangan dan keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang,” papar Novanto.

Dia menambahkan, ada begitu banyak tantangan menyukseskan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satunya kemiskinan.

Karenanya, diharapkan forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan.

Disamping itu, konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme juga menjadi tantangan lain yang dihadapi, karena dapat membalikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah Negara. “Saya mendorong forum ini mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan. Karena saya menyadari, Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian,” katanya.

Dilanjutkan Novanto, masih banyak tantangan kompleks yang dihadapi dalam pencapaian agenda 2030. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Parlemen, harus menjalin kemitraan kolaboratif untuk melaksanakan rencana aksi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

“Saya yakin forum ini akan berjalan produktif, lancar, dan sukses. Sehingga dapat memperkuat peran parlemen dan membangun sinergitas serta keterlibatan seluruh pihak dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,” tandas Novanto dilanjutkan dengan pemukulan Gong tanda dibukanya Forum Parlemen Dunia. ■

(tim), foto: ekafr.



Foto bersama Delegasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development, di BNDCC



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf memberikan sambutan pada acara WPF di Bali

# Sidang Parlemen Dunia Momentum Bersejarah Bagi Indonesia

Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara dari seluruh benua menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator dilaksanakannya konferensi internasional ini.

**K**etua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, sejak dideklarasikannya komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan di Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) New York pada September 2015, forum yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 06-07 September ini menjadi ajang pertama kali berkumpulnya seluruh parlemen untuk membahas progress pelaksanaan agenda 2030.

Dengan mengangkat tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development,” sidang ini terbagi dalam tiga sesi pembahasan. Pertama, Leave no One Behind, sesi ini akan mengupas peran parlemen dalam membuat regulasi untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesi kedua, Ending Violence Sustaining Peace, menguraikan peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian. Sementara, pada sesi terakhir sebagai sesi puncak akan membahas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Climate Action. Sesi ini akan melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti COP 21 atau Paris Agreement.

“Sebagai anggota DPR yang memiliki peran penting dalam pembuatan regulasi, kita patut menjamin pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Serta melakukan review dan evaluasi apa yang telah dilakukan dan apa saja yang perlu ditingkatkan,” ungkap Nurhayati saat menyambut delegasi dalam acara jamuan makan malam, Selasa (5/9) di Bali.

Terlihat beberapa delegasi internasional yang turut hadir, seperti UNEP, Women Parliament Leader, UN-SDSN, INFID, GOPAC, WFD, European Union dan AIPA. ■



Tim Penerbitan Setjen dan BK DPR RI dipimpin Kabag Penerbitan mendengarkan penjelasan dari Branch Communication Manager AP II Dewandono Prasetyo Nugroho terkait permohonan izin perpanjangan penempatan Rak Display Majalah dan Buletin Parlemen di lingkungan Bandara Soetta, Jumat (8/9). Foto : Tim Penerbitan

- PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



(tim) foto : jakar/hr.

## PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
- DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
- ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,  
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Pimpinan DPR RI saat memimpin Rapat Paripurna

## DPR Keras Tragedi Kemanusiaan Myanmar

DPR RI mengecam keras tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan Pimpinan DPR akan mengundang Pimpinan Fraksi-fraksi untuk rapat konsultasi yang akan diagendakan sesegera mungkin.

“Tadi sudah didiskusikan dengan pimpinan mulai dari Ketua DPR pak Novanto, pak Fahri Hamzah, kita akan menindaklanjuti secara serius terkait dari aspirasi kawan-kawan semua,” papar Taufik saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Diketahui, kekerasan di Rakhine, Myanmar yang terjadi akhir-akhir ini telah mengakibatkan empat kampung dibakar oleh aparat keamanan, sehingga membuat warga menyelamatkan diri

ke negara tetangga, Bangladesh. Gelombang pengungsian terbaru dipicu oleh serangan mematikan terhadap pos-pos keamanan di Rakhine oleh milisi Rohingya yang dibalas dengan operasi keamanan oleh militer Myanmar.

Setidaknya 110 orang tewas, 11 di antaranya pejabat negara bagian, sementara ribuan warga sipil mengungsi ke Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) mencatat jumlah warga Rohingya yang mengungsi mencapai sedikitnya 18.445 orang.

Sebelumnya dalam kesempatan

yang sama, empat anggota DPR RI yakni Al Muzzammil Yusuf (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan pernyataan sikapnya tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

Bahkan Yandri mengusulkan, agar pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Myanmar agar memberikan keterangan secara jelas, apa yang terjadi di negaranya. Jika benar Myanmar secara sengaja melanggar hak-hak kemanusiaan maka dubesnya layak



## Perlu Pelibatan Tentara Asing dan Pasukan PBB Untuk Bantu Rohingya

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan perlu pelibatan tentara militer asing dan pasukan perdamaian PBB untuk membantu etnis Rohingya. Sebab, pemerintah Myanmar sudah melibatkan militernya dalam mengusir etnis Rohingya dari wilayahnya di Rakhine.

“Saya kira kita harus keras, ga boleh main-main, karena kalau tentara Myanmar itu sudah terlibat maka tentara asing diperlukan. Karena bersenjata harus dihadapi dengan yang bersenjata, oleh itulah selain tekanan diplomatik yang luar biasa, maka pengiriman militer dan tentara perdamaian PBB makin diperlukan,” tegasnya usai pembukaan World Parliamentary Forum di Nusa Dua Bali Convention Centre, Rabu (6/9).



Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Lebih lanjut menurut Fahri diri, dirinya mengapresiasi pemerintah melalui Menlu yang relatif cepat melakukan

diplomasi dan lobi lobi kemanusiaan, tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah menekan militer Myanmar yang terindikasi terlibat didalam pembantaian itu.

Oleh karena itu, dalam forum parlemen dunia ini, DPR ingin menunjukkan kepada delegasi-delegasi Negara lain, bahwa Indonesia serius dalam mempertahankan pembangunan berkelanjutan, aspek lingkungan, juga aspek pembangunan sosial dan harmoni serta toleransi antara kelompok.

“Karena itu tadi baik Ketua DPR dan Ketua BKSAP, secara serius menyampaikan posisi Indonesia. Bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh militer di Myanmar itu dianggap ringan,” jelasnya. ■

(tim), Foto: Eka/hr

diusir dari tanah air Indonesia.

“F-PAN juga mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta, diminta keterangan langsung, apa yang sebenarnya terjadi, kalau ada hal-hal yang patut dilakukan lebih lanjut, kami mengusulkan duta besar Myanmar diusir dari Negara Republik Indonesia,” tandas Yandri.

Setelah itu, Al Muzzammil Yusuf mengatakan peran aktif Indonesia dalam tragedi kemanusiaan adalah amanat konstitusi, dalam rangka menyelenggarakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan pri keadilan.

“Sebagai bagian dari amanat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan pri keadilan,” ungkap Al Muzzammil. ■

(eko/sc), Foto: Jaka/hr



<http://cdn.bantenhits.com>



Empat anggota DPR lintas fraksi menyampaikan pernyataan sikap atas tragedi Rohingya

## Empat Anggota DPR Lintas Fraksi Nyatakan Sikap Kemanusiaan Rohingya

Empat orang anggota dari empat fraksi di DPR RI yakni Al Muzzammil Yusuf (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), Sodik Mudjahid (F-Gerindra), dan Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan pernyataan sikapnya tentang rasa kemanusiaan terhadap peristiwa yang terjadi di Rohingya Myanmar beberapa waktu belakangan ini.

“Fenomena disana secara kemanusiaan semakin berat. Oleh karenanya pada hari ini atas nama pemerintah konstitusi, yakni dimana dalam amanat konstitusi kita menyatakan anti penjajahan, dan kita harus berperan aktif dalam kemanusiaan. UUD 1945 juga mengamanatkan tentang HAM, maka kami ingin menyatakan bahwa kami yang terdiri dari empat fraksi dan Insya Allah fraksi yang lain juga akan bergabung akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengirimkan 500 Anggota Dewan se ASEAN untuk ikut memantau apa yang terjadi di Rohingya Myanmar,” ujar Muzzammil sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kamis (31/8).

Muzzammil mengatakan, selain

pemerintah, PBB, dan LSM, Anggota Dewan juga harus berperan menjalankan tugas amanat konstitusi, minimal 100 Anggota parlemen ASEAN dari seluruh fraksi di ASEAN dikirimkan untuk memantau peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. “Semangat ini adalah semangat hampir seluruh fraksi yang akan kami nyatakan didalam Rapat Paripurna,” ucapnya.

Senada dengan Muzzammil, Anggota DPR RI Yandri Susanto menegaskan bahwa Myanmar merupakan bagian dari komunitas dunia, dia harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai universal kemanusiaan, tidak boleh membabi buta bahwa yang berbeda keyakinan dan etnis menjadi dianggap musuh oleh Myanmar.

“Kami meminta pemerintah untuk lebih nyata bertindak. Kalau perlu Duta Besarnya diusir dulu, agar mereka paham

bahwa masalah kemanusiaan itu penting. Karena perintah undang-undang, Indonesia harus lebih proaktif terhadap masalah kemanusiaan. Myanmar adalah bagian dari ASIAN maka Indonesia harus paling depan,” tandas Yandri.

Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan bagian dari kinerja DPR, yakni diplomasi parlemen. “Pada bulan-bulan ini akan kami intensifkan kepada ASEAN, dan juga kepada seluruh negara untuk mempunyai komitmen yang kuat terhadap Myanmar,” tuturnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melalui anggotanya Junimart Girsang menyatakan, fraksi PDI-P mendorong pemerintah agar segera membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar. “Apapun alasannya, hak asasi manusia menjadi dasar tertinggi dari negara kita. Kita juga tidak mau kejadian di Myanmar itu berimbas ke Indonesia. Rasa kepedulian masyarakat Indonesia melalui wakil-wakil rakyat di DPR ini harus kita tunjukkan kepada masyarakat yang tertindas disana,” ungkapnya. ■



# Kekurangan Hakim Agung Jadi Bahasan Komisi III dengan MA

Kekosongan kursi jabatan Hakim Agung menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan Ketua Mahkamah Agung beserta jajaran di Ruang Kusuma Atmaja, Gedung MA, Jakarta, Senin (4/9). Dalam rapat itu terungkap, dari kuota 60 kursi Hakim Agung, saat ini hanya terisi 44 hakim.

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, rapat konsultasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan antara Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung. Terkait kekurangan Hakim Agung itu, pihaknya telah menerima usulan Calon Hakim Agung (CHA) dari Komisi Yudisial, dan akan segera memulai fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) kepada seluruh calon pekan depan.

“Nama-nama CHA sudah diberikan KY. Kami ingin tahun kebutuhan MA seperti

apa. Ketua MA sudah menyampaikan sekarang ini ada 44 Hakim Agung dari seharusnya 60 Hakim Agung,” kata Trimedya.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, secara kinerja kekosongan jabatan Hakim Agung itu dinilai tidak berpengaruh terlalu signifikan. Namun dalam rangka untuk lebih meningkatkan lagi penyelesaian perkara di tingkat MA, tentu kebutuhan akan Hakim Agung ini harus dipenuhi. Trimedya memastikan, kualitas hakim tetap menjadi perhatian Komisi III DPR.

“Terkait kualitas, tadi juga Ketua MA menyampaikan bahwa perlu mengisi kekosongan Hakim Agung. Tapi kalau kualitas calon tidak memenuhi, maka MA siap jika jumlahnya belum mekasimal. Kualitas menjadi perhatian utama. Tidak hanya menambah jumlah Hakim Agung saja, tapi juga harus memenuhi unsur kualitas,” imbuh Trimedya.

Dalam rapat itu juga dibahas mengenai Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim. Trimedya menjelaskan bahwa Panja RUU Jabatan Hakim pada Jumat (8/9) direncanakan akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Kunjungan ini dalam rangka public hearing untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, akademisi hingga lingkungan peradilan. “Kita targetkan RUU ini selesai akhir tahun ini,” komitmen politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali mengaku pihaknya membutuhkan cukup banyak Hakim Agung. Namun terkait rekrutmen CHA diserahkan kepada Komisi III DPR dan KY. “Semoga bisa terpenuhi kamar-kamar yang masih kekurangan hakim, tapi tetap menjaga kuliatas hakim itu sendiri,” kata Hatta. ■

(sf,mp), foto:azka/hr



Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan saat pertemuan dengan Mahkamah Agung

# ISPPPI Dukung Kerja Pansus Angket KPK

Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI) Siswadi Winoto menyatakan apa yang dikerjakan Pansus Angket terungkap banyak kebenaran yang perlu dibela dan banyak kesalahan yang perlu dikoreksi. "Kami sangat mendukung Pansus ini," tandasnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU dengan asosiasi tiga profesi di Jakarta, Senin (4/9).

**D**alam acara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu, Siswadi menjelaskan kini korupsi telah menjadi musuh bersama. Dulu korupsi yang merugikan negara hanya ditangani jaksa dan polisi, kalau suap hanya ditangani polisi termasuk gratifikasi. Namun sekarang yang merugikan negara baik suap atau gratifikasi masuk korupsi. Karena itu ke depan perlu ada pembagian kelas-kelas ini.

"Kelas korupsi itu mestinya jangan sama tapi ada kelas berbeda sehingga misalnya ada pejabat negara menerima pemberian, dianggap gratifikasi sehingga bisa diproses menjadi korupsi," jelasnya.

Lebih lanjut Siswadi mengatakan, sepatok korupsi menjadi musuh bersama sehingga harus ditangani bersama. Karena musuh bersama, maka institusi yang menangani yaitu jaksa, polisi dan KPK harus bersama pula. Namun dalam perkembangannya terjadi persaingan yang tidak sehat. "Bukan saling memperkuat, tapi malah ada upaya melemahkan," jelasnya.

Sebelumnya ada kerja sama dengan istilah criminal justice system (SJS) terdiri polisi, jaksa dan hakim namun tidak pernah lagi kelanjutan pembahasan. Dengan adanya lembaga baru KPK dan masuk system ini, diharapkan lembaga-lembaga ini mempunyai kedudukan hukum, wewenang dan anggaran serta fasilitas yang sama sehingga bisa berjalan seiring memberantas korupsi. ■

(mp), Foto: iwan armanias/hr



Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia Siswadi Winoto saat menyampaikan pernyataan di Pansus

## KPK Arogan Menuding Pansus Halangi Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai arogan, karena telah menuding Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengganggu proses peradilan (obstruction of justice). Pansus Hak Angket yang dibentuk DPR ini dilindungi konstitusi.



Anggota Pansus Angket KPK Daeng Muhammad



# Kejaksaan Merasa Dianaktirikan

Lembaga Kejaksaan merasa dianaktirikan dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Selain masih menganut rezim perizinan dalam menangani tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga minim anggaran bila dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

**D**emikian dikemukakan Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Noor Rochmad saat menyampaikan pandangannya pada rapat dengar pendapat di Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Senin (4/9). “Kinerja penanganan korupsi oleh kejaksaan mengalami penganaktirian dibanding teman-teman yang ada di KPK. Dalam penanganan korupsi, jaksa ini dibatasi dengan rezim perizinan. Ini yang nyata dilihat oleh kita semua,” ujarnya.

Rezim perizinan yang dimaksud adalah Kejaksaan harus selalu meminta izin ke Bank Indonesia (BI) bila ingin memblokir rekening tersangka. Sebaliknya, KPK malah bisa langsung mendatangi bank asal rekening tersangka yang sedang disidik, tanpa perlu izin BI. KPK betul-betul lepas dari rezim perizinan.

Selain itu, PJI juga melihat anggaran Kejaksaan jauh lebih rendah daripada KPK. Disinilah penganaktirian Kejaksaan semakin jelas. KPK malah mendapat dukungan anggaran yang besar. Ditengah minimnya dukungan anggaran dan rezim hukum, Kejaksaan tetap masih lebih berprestasi daripada KPK. Angka kasus korupsi yang ditanganinya tetap jauh lebih banyak daripada KPK.

**D**emikian penegasan Anggota Pansus Hak Angket KPK Daeng Muhammad di sela-sela rapat Pansus, Senin (4/9). Tudingan yang dialamatkan KPK terhadap Pansus itu dilontarkan Ketua KPK sendiri Agus Raharjo. Adalah hak DPR untuk membentuk Pansus Hak Angket dan lembaga lain harus menghormatinya. Sejauh ini, Pansus tak pernah intervensi atau menghalangi peyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

“Anda bisa bayangkan Ketua KPK mengancam kami, karena dianggap melakukan penghalangan penyidikan dan dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Ini, kan, keterlaluan. Buat saya ini



Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia Noor Rochmad saat mengemukakan pandangannya di Pansus Angket KPK

“Namun dengan kondisi minim ini, bila dibandingkan dengan KPK, saya melihat kinerja kami masih lebih unggul. Ini mendapat pengakuan dari ICW. Kejaksaan lebih banyak produknya daripada KPK yang dibiayai dengan anggaran besar. Tahun 2016, penyidikan oleh Kejaksaan mencapai 1600 perkara dan eksekusi 1056 perkara. Penuntutan mencapai 2434, penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dan penuntutan Rp 331 miliar

lebih. Eksekusi uang pengganti mencapai Rp 157 miliar lebih,” ungkap Ketua PJI lagi.

Dengan berdirinya KPK, sebetulnya PJI melihat, bisa menjadi *trigger mechanism* untuk memacu semangat kerja korps adyaksa ini menjadi lebih baik. Dengan kinerja yang terus meningkat, peran KPK pun perlahan bisa dihentikan. Sebelumnya, ketika KPK dilahirkan, kejaksaan dan Kepolisian dinilai tidak efektif menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. ■

(mh), Foto:wan/hr

adalah arogansi lembaga terhadap lembaga lainnya. Lembaga KPK dibentuk dengan UU yang sifatnya *ad-hoc*. Lembaga utamanya adalah kepolisian dan kejaksaan. Fungsi KPK untuk menguatkan dua lembaga utama itu dengan melakukan supervisi dan koordinasi,” tandas Daeng.

Politisi PAN ini tak habis pikir dengan sikap Ketua KPK yang menuding Pansus dengan pernyataannya itu. Padahal, DPR adalah lembaga tinggi negara yang punya hak penuh membentuk Pansus untuk mengawasi KPK. Pansus hanya ingin bertanya dan mengonfirmasi berbagai temuan yang didapatnya menyangkut penyelewengan yang dilakukan

KPK. Lembaga antirasuah ini tinggal menjawab saja, tanpa perlu menuding DPR melakukan *obstruction of justice*.

Ditambahkan Daeng, KPK tak perlu merasa dirinya lebih superior atas lembaga lainnya. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang lebih kuat daripada lembaga lainnya. “Harusnya ini didengar juga oleh Pimpinan KPK. Kita ingin sama-sama membangun negara, bagaimana kita punya penegakan hukum yang berkeadilan, terbuka, dan transparan ke publik,” ucap Daeng kepada pers. ■

(dep), Foto:wan/hr

# Putusan PTUN Jadi Landasan Pansus Angket KPK Hadapi *Judicial Review*

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI sudah menerima surat putusan keabsahan Pansus dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar menyatakan bahwa dengan adanya keputusan bernomor 159/B/2017/PTUN tersebut, semakin menguatkan Pansus Angket KPK untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga KPK.



Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar

**K**eputusan PTUN itu menindaki lanjut gugatan tujuh advokat yang diketuai Muhammad Sholeh terhadap Pansus Angket KPK.

“Dengan demikian, keributan sebelumnya yang menyebut Pansus KPK menyalahi aturan sudah selesai. Gugatan penggugat itu ditolak dan menyatakan angket adalah hak konstitusional yang menjadi kewenangan DPR,” ucap Agun, Rabu (6/9).

Keputusan PTUN tersebut akan dijadikan landasan bagi Pansus dalam menghadapi uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi atas laporan pegawai KPK.

“Ini adalah sebuah fakta persidangan yang akan menjadi bagian bagi kita ketika menghadapi judicial review di Mahkamah konstitusi,” pungkasnya. ■

Foto: iwan armanias/hr (dep.mp)

## Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan

Pansus Angket KPK akan memasuki babak akhir. Namun sampai saat ini, KPK belum menjawab panggilan Pansus Angket KPK, alasannya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status keabsahan pansus tersebut.

**M**enanggapi hal tersebut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa meminta masukan dari berbagai pihak. Salah satunya, mantan Ketua MK yang saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.

Jimly menganjurkan agar MK segera mengeluarkan putusan, karena menurutnya ini adalah masalah genting



Suasana silaturahmi Pansus Angket KPK dengan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie



yang harus segera diselesaikan. Dia juga menyarankan agar pansus berkitir surat ke MK untuk meminta prioritas putusan agar disegerakan. Dia menganggap masalah penting ini harus segera diputuskan MK.

“Saya dengar sidangnya sudah, kenapa lama-lama ini kan masalah genting,” ujar Jimly di ruang pertemuan ICMI, Jln Proklamasi Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Menanggapi hal tersebut Agun menyampaikan, pemberantasan

korupsi tetap menjadi semangat dan cita-cita pansus. Dengan harapan, penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan bersih, APBN yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Pemberantasan korupsi ke depan tetap menjadi semangat cita-cita kami. Karena kami bagian dari perjalanan reformasi itu sendiri. Kami lebih pada orientasi kepentingan rakyat,” papar Agun.

Jimly juga menganjurkan agar KPK dapat menghadiri panggilan Pansus Angket. “Saya menganjurkan KPK nanti

kalau dipanggil ya hadir saja. Tapi tentu KPK menunggu proses hukum. Proses yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa perkara judicial review yang diajukan beberapa kelompok,” ungkap Jimly.

Selain Ketua Pansus Angket KPK, kunjungan ini juga dihadiri Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu, anggota lainnya, dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, dari Fraksi PPP Anas Thahir, dan dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi. ■

(eko.sf), foto: iwan/hr

## DPR Minta Komitmen Pemerintah Selesaikan Prolegnas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo kembali menegaskan pentingnya komitmen pemerintah bersama DPR dalam upaya menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hal tersebut disampaikan Firman dalam sambutannya selaku Ketua Panitia Workshop “Membangun Komitmen Bersama Pembentuk Undang-Undang Dalam Mencapai Target Program Legislasi Nasional” di Hotel Eastparc Yogyakarta, Rabu pagi (6/9).

“Komitmen pada Prolegnas 2018 pemerintah harus fokus pada UU yang dibutuhkan. Ada 49 RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas tahun 2017,” ungkap Firman Subagyo.

Politisi senior partai Golkar ini menyayangkan terjadinya inkonsistensi dari pemerintah dan kurangnya hak-hak konstitusional DPR melalui Baleg terkait komitmen untuk membahas UU.

“Sesuai Pasal 22 UUD 1945 Penyusunan UU antara DPR dan Pemerintah. DPR yang berwenang membahas UU dan pemerintah memberi persetujuan, namun pada pelaksanaannya saat ini seolah terbalik. Mereka (pemerintah) yang seringkali menyodorkan UU untuk segera mendapatkan persetujuan dari DPR,” tambah Firman.

Legislator yang juga anggota Komisi

IV DPR ini mengambil contoh berlarut-larutnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol salah satunya karena masalah judul. Sudah delapan kali masa sidang tidak juga menyelesaikan masalah. Padahal secara substansi sudah selesai namun hingga saat ini belum juga disahkan karena belum ada kesepakatan soal judulnya.

“Jangan belum apa-apa, seorang menteri sudah membuat statement untuk tidak melanjutkan pembahasan UU. Pernyataan semacam ini harus dihindari karena bisa menghambat proses legislasi yang sedang berjalan,” sergah Firman.

Politisi Dapil Jawa Tengah III ini

mengharapkan melalui workshop Badan Legislasi apa yang menjadi rencana strategi pemerintah 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi kebijakan dalam proses penyusunan UU, sehingga tidak serta merta muncul di tengah jalan. Juga menjadi sarana mengurai sumbatan-sumbatan dalam proses legislasi nasional.

Jangan sampai hanya komitmen pada proses pembuatannya namun melemah pada komitmen pelaksanaan UU. Selaku Ketua Panitia Workshop, Firman Subagyo berharap hasil workshop akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden.

Kita yang memulai proses legislasi, kita jugalah yang harus mengakhiri,” pungkas Firman Subagyo mengakhiri sambutan diikuti riuh tepuk tangan peserta workshop. ■

(Ojisc), Foto: Naelturoj/hr

## Membangun Komitmen Ber Dalam Mencapai Target



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo saat menyampaikan sambutan

# Fadli Zon Buka Pameran Seni Rupa



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Pameran Seni Rupa di DPR RI



Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka pameran seni rupa di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta. Pameran ini merupakan rangkaian peringatan HUT DPR ke-72.

**D**alam sambutannya, Fadli mengatakan ini kali ketiga DPR mengadakan pameran seni rupa kepada publik, tema yang diangkat dalam pameran adalah 'Seni dan Politik'.

"Pameran ini dalam rangka mengapresiasi karya-karya seniman yang berasal dari berbagai daerah dengan banyak pengalaman. Kita ingin menghargai seni sebagai kekayaan nasional dan berharap karya seni bisa diapresiasi," kata Fadli, Senin (5/8).

Semangat diselenggarakannya pameran seni rupa ini lanjut Fadli, adalah untuk memberi mengapresiasi serta untuk memberikan ruang kepada seniman-seniman.

"Kita mau beri ruang pada seniman, jadi DPR isinya bukan politik saja," ungkapnya, seraya menegaskan "Terkadang politik itu melelahkan, seni yang bisa menyatukan kita, seni yang bisa memberikan kesejukan tersendiri, seni juga yang bisa membuat pertarungan politik jauh lebih manusiawi," jelasnya.

Sebelumnya, Doni selaku Kurator mengungkapkan terimakasih kepada DPR yang telah memberi apresiasi kepada seniman dengan menyelenggarakan pameran seni rupa untuk yang ketiga kalinya.

Dia berharap, hal baik ini bisa terus terselenggara, karena diketahui banyak sekali seniman Indonesia yang diperebutkan di berbagai negara. "Artinya aset bangsa ini harus kita support, kita apresiasi," ungkapnya

Pameran seni rupa ini diikuti oleh 17 seniman yang berasal dari empat kota besar yaitu Jakarta, Jogjakarta, Padang, Bali.

Didampingi Ketua BURT Anthon Sihombing, Fadli mengajak beberapa duta besar dari negara sahabat seperti Iran, Iraq, Afganistan, Jerman, dan negara sahabat lainnya untuk melihat karya seni seniman-seniman yang tengah dipamerkan. Rencananya, pameran seni rupa Kepada Publik akan berlangsung hingga 8 September 2017. ■

(via,mp). Foto : Anief/itr

# Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia Bukan Jawa Saja

Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk Pulau Jawa semata. Hal ini diutarakan berdasarkan pengamatannya yang saat ini pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berfokus di Pulau Jawa saja, hal itu terlihat dari besaran distribusi dana desa yang tidak merata.

“Fokus kita membangun Indonesia, bukan Jawa. Mohon dalam konstruksi distribusi dana transfer daerah itu mempertimbangkan betul-betul kemajuan di luar Jawa,” tutur Sirmadji saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, (5/9).

Politisi PDIP ini mencontohkan, dalam distribusi dana desa di Jawa Timur jumlahnya 7 kali lipat dari distribusi dana desa di Maluku Utara. Sehingga ini menunjukkan adanya ketimpangan

distribusi yang menyebabkan Pulau Jawa pertumbuhannya masih jauh lebih cepat dibanding daerah Maluku Utara.

“Maluku Utara itu distribusi dana desanya dibanding Jawa Timur itu tujuh kali Maluku Utara. Itu artinya percepatan Jawa Timur itu maju 7 kali lebih cepat dari Maluku Utara, mohon ini jadi perhatian,” jelas Sirmadji.

Dengan adanya distribusi dana desa yang merata, menurutnya akan dapat mempercepat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Meksipun, pada RAPBN 2018,

anggaran dana desa tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 60 triliun.

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. ■



Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji



Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar saat meninjau Rumah Sakit Mitra Medika di Pontianak

## BURT DPR Tinjau Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak

Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar beserta rombongan meninjau Rumah Sakit Mitra Medika di Pontianak untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada anggota dewan dan keluarganya di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak merupakan salah satu rumah sakit provider PT. Jasindo di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

(hs), Foto: Jayadi/fhr



“Sebagaimana yang dipaparkan oleh pihak RS Mitra Medika Pontianak, RS Mitra Medika dengan fasilitas dan termasuk tenaga kesehatan siap melayani anggota dewan dan keluarganya. Tidak hanya itu saja yang kami tinjau, yang lebih penting adalah hubungan yang harmonis antara Jasindo dengan pihak rumah sakit. Karena ini mempengaruhi pelayanan nantinya,” kata Hasrul saat memimpin Tim BURT meninjau RS Mitra Medika di Pontianak, Rabu (6/9).

Politisi PPP ini mengatakan, jika hubungan PT. Jasindo dengan pihak rumah sakit tidak baik, tentunya pihak rumah sakit juga akan tidak baik pula memberikan pelayanan kepada para anggota dewan yang memegang kartu Jamkestama VVIP. “Tadi dipaparkan sudah ada sosialisasi, sudah ada SOP. Artinya sudah betul, dan hubungan kerjasama Jasindo dengan pihak rumah sakit pun sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

BURT DPR RI menurutnya hanya ingin memastikan itu, karena mereka ingin memberikan jaminan atau memberikan kepastian kepada 560 anggota dewan di DPR. Jika sesuatu terjadi di Pontianak, Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak harus selalu siap memberikan pelayanan terbaik.

Tapi lanjutnya, kalau hubungan itu tidak baik akan kita koreksi. “PT. Jasindo yang kita koreksi bukan pihak rumah sakitnya. Karena kita bermitra dengan Jasindo bukan dengan rumah sakit,” ujarnya.

“Kalau ternyata belum ada sosialisasi belum ada SOP, belum ada kartu, Jasindo yang kita tegur, karena ini penting, hal ini berpengaruh pada pelayanan pada kami anggota dewan khususnya,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama RS Mitra Medika Pontianak dr. Suriviana, M.Sc, Sp.A menyatakan bahwa pada intinya kerjasama antara rumah sakit dengan Jasindo sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kerjasama dengan Jasindo memang baru tahun 2017, namun untuk hubungan kerjasama relatif tidak ada masalah. Baik klaim maupun informasi tentang data base, dan upgrade data base selalu dikomunikasikan.

Sebagaimana diketahui, 560 orang anggota DPR RI dan keluarganya diberikan jaminan kesehatan oleh pemerintah, dan asuransi yang menjalankan itu adalah PT Jasindo. BURT DPR diberikan mandat untuk melihat bagaimana peran PT Jasindo didalam mencari rumah sakit-rumah sakit yang dijadikan sebagai provider untuk melayani para anggota dewan dan keluarganya di seluruh Indonesia.

Selain fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit provider, patut diketahui bagaimana hubungan atau pola kemitraan PT Jasindo dengan rumah sakit-rumah sakit yang dijadikan providernya. Kalau tidak harmonis, misalnya pembayarannya sering terlambat, klaimnya sering telat tentunya akan mempengaruhi pelayanan rumah sakit tersebut kepada anggota DPR RI. ■

(Andri, sc), Foto Andri/hr

## Bakamla Harus Menjadi Andalan Keamanan Laut Indonesia

Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki tugas utama untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sehingga, Bakamla harus menjadi institusi yang diandalkan untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

“Bakamla yang menjadi koordinator antara Polisi Air, Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta institusi terkait lainnya dalam menjaga laut kita. Semua yang berurusan dengan laut, Bakamla yang menjadi andalan kita,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi, usai RDP dengan Bakamla di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Namun yang cukup mengecewakan politisi F-Gerindra itu, Presiden yang selalu mengumandangkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim, berbanding terbalik dengan anggaran yang diberikan kepada Bakamla. Anggaran Bakamla dinilai terlalu minim.

“Bakamla tidak berani mengajukan anggaran yang besar. Karena ketika mengajukan yang besar, itu selalu dikurangi oleh pemerintah. Bahkan anggarannya pernah dikurangi Rp 200 miliar. Mereka bisa apa dengan keadaan itu,” kata Elnino seolah bertanya.

Elnino menegaskan, saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan Bakamla. Jika pemerintah serius dalam menjaga laut Indonesia, Komisi I pun bertekad menguatkan Bakamla. Apalagi pemerintah sekarang konsentrasi dengan laut, seharusnya dengan menambah anggaran Bakamla.

“Ada banyak yang dibutuhkan oleh Bakamla. Untuk keamanan laut seperti kapal patroli, kerjasama dengan polisi air, AL, hingga KKP. Untuk menjadi lembaga yang seperti rencana awal dibentuknya Bakamla yang menjaga keamanan laut, harus melihat dasar hukum dibentuknya Bakamla,” tutup politisi asal dapil Gorontalo itu. ■

(st.rmp), Foto: runi/hr



Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M Husein Mohi

## BPOM Perlu Perkuat Struktur Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membahas beberapa hal penting, diantaranya tentang pengawasan terhadap peredaran obat secara online. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Syamsul Bachri ini juga meminta penjelasan kepala badan POM terkait iklan obat tradisional.

**N**amun yang menjadi penekanan Komisi IX adalah penguatan struktur pengawasan yang ada di internal BPOM. Dalam rapat ini Komisi IX juga ingin memastikan bahwa toko-toko obat yang ada di sekitaran masyarakat menjual obat-obatan yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan tidak membahayakan jika dikonsumsi.

Syamsul juga mengharapkan, agar apotik-apotik dikelola oleh para apoteker yang profesional dan ahli di bidangnya, karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. "Penjelasan Kepala Badan POM, terkait pengawasan dan penanganan zat adiktif, termasuk tindakan yang diambil

untuk mencegah penyalahgunaan produk," papar Syamsul di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Disisi lain Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito akan mengawasi secara serius peredaran obat-obatan, dan pemantauan pada iklan obat-obatan. Selain itu yang menjadi perhatian serius

adalah penanganan zat adiktif, termasuk tindakan yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan produk tersebut. Dia juga menekankan peredaran obat tidak boleh diperjualbelikan secara online karena akan sulit dalam penindakan dan pengawasan.

Zat adiktif yang menjadi pembahasan tersebut adalah, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. ■

(eko), foto: Jayadi/hr



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri



Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal

## Utang Harus Dilakukan Secara Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI per tanggal 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp 3.779,98 triliun

“Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang kita lakukan sekarang bermasalah dikemudian hari. Untuk itu adalah sebuah keniscayaan memastikan bahwa utang yang kita lakukan saat ini adalah utang produktif yang mengandung aspek ekonomi,” jelas Refrizal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (4/9).

Refrizal menegaskan jangan sampai

utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang. Seperti pembangunan dermaga atau pelabuhan yang ternyata tidak tepat sasaran, begitu diresmikan ternyata pelabuhan tersebut tidak digunakan karena tidak tepat sasaran. “Di beberapa daerah Sumatera, saya menyaksikan banyak dermaga yang dibangun dengan APBN tetapi malah tidak digunakan karena pertimbangan

pembangunan yang tidak tepat,” tuturnya.

Aspek penting yang juga menjadi sorotan adalah besarnya utang yang ditanggung oleh negara. Saat ini diperkirakan sekitar 30% APBN 2018 digunakan untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Menurut Refrizal, angka tersebut cukup besar.

“Angka 30% ini cukup besar. Namun, perlu kami ingatkan, negara lain yang dibandingkan tersebut memiliki tingkat



penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan Indonesia, sedangkan tingkat tax ratio kita hanya ada dikisaran 12%,” ungkapnya.

Perlu dicermati bahwa utang menjadi beban anggaran dari tahun ke tahun. Beban utang semakin besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pembayaran

kewajiban utang pemerintah mencapai Rp 155 triliun atau 8,6% dari belanja negara, angka ini melonjak menjadi Rp 182 triliun atau 9,7% dari belanja negara.

Pada tahun 2017, berdasarkan APBN 2017, kewajiban bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 220 triliun dan pada RAPBN 2018 yang diajukan

pemerintah, beban ini mencapai Rp 247 triliun atau 11,2% dari belanja negara. “Dengan kata lain pembayaran bunga utang pada RAPBN 2018 lebih besar dibanding belanja subsidi dan belanja fungsi perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp 172 triliun dan 162 triliun,” pungkaskan Refrizal. ■

(hs), Foto: iwan armanias/hr

## Diduga Terjadi Kegagalan Bangunan Jembatan Tanipah Ambruk

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Fary Djemy Francis memberikan perhatian serius terhadap Jembatan Tanipah yang ambruk baru baru ini. Jum'at (25/8) lalu.

Jembatan yang menghubungkan Desa Bangkit Baru – Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, ambruk pada tanggal 17 Agustus 2017. dibangun memakai dana DAK APBN Perubahan 2015 senilai Rp 17.444.198.000. dan sampai saat ini penyebab ambruknya jembatan masih dalam Investigasi Tim penegak hukum.

Dalam Kunjungan spesifik ini Tim Komisi V DPR RI selain memastikan hal hal yang berkaitan dengan penerapan UU Jasa Konstruksi yang sudah disahkan.

juga melakukan mediasi dengan Bupati dan semua komponen aparat hukum untuk mencari solusi sebagai pengganti jembatan yang ambruk.

Fary Djemy Francis menjelaskan, dalam UU Jasa Konstruksi ada pasal pasal yang mengatur, baik penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap jembatan dan bangunan yang dinyatakan gagal bangunan. “Jembatan Tanipah yang ambruk ini patut diduga terjadi kegagalan bangunan” tegas Fery.

Unutk itu pihaknya fokus penanganan pasca runtuh. Komisi V ingin memastikan

pembangunan jembatan darurat dipercepat, guna mengantisipasi arus lalu lalang masyarakat sekitar. “ Kami mengharapkan secepatnya pembangunan jembatan darurat sebagai bentuk alternatif yang ada,” ujarnya.

Kedatangan Tim Komisi V DPR RI disambut Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad yang juga mantan anggota DPR Komisi V serta pejabat mitra kerja terkait. Menurut Bupati, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan investigasi BBPJN XI. “Nanti akan dibikin jembatan darurat,” ujar Hasanuddin Murad. ■

(ds,mp), foto : ds/hr



Tim Kunjungan Komisi V saat meninjau jembatan Tanipah yang ambruk di Kalimantan Selatan



Anggota DPR RI menjadi pembicara pada diskusi Dialektika Demokrasi

## DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait Freeport

Langkah Presiden Jokowi yang berhasil melunakkan PT. Freeport Indonesia, sehingga kepemilikan saham pemerintah Indonesia kini menjadi sebesar 51 %, meski pengolahan konsentrasinya baru akan dilakukan pada 5 tahun mendatang, mendapat apresiasi dari DPR.

“Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 % saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak berkurang, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT. Freeport,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Satya berbicara dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemana Divestasi Saham Freeport?” bersama anggota Komisi VII DPR Kurtubi, anggota DPD dari Papua Charles Simare Mare, dan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

Bahkan kata politisi Golkar itu, Freeport siap investasi 20 miliar dollar AS sebagai bisnis tambahan termasuk

untuk membangun smelter. Karena itu dia mengajak seluruh elemen bangsa ini khususnya rakyat Papua untuk berjuang bersama kepemilikan saham Freeport sampai 100 %.

Hal yang sama dikatakan Kurtubi, jika keberhasilan itu perlu diapresiasi. Terutama, kesediaan Freeport meninggalkan KK dan mau mengikuti UU IUPK. “Itu sudah luar biasa. Sehingga KK itu tak berlaku lagi,” ujarnya.

Persoalannya adalah nilainya berapa dari 51 % tersebut. “Jangan sampai tidak mampu membayar, makanya harus dikembalikan ke Pasal 33 UUD NRI 1945, sepanjang kekayaan alam itu ada di perut bumi maka harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata politisi Nasdem itu.

Karena itu menurut Kurtubi, pemerintah tak boleh membeli kekayaan yang ada di bumi sendiri. Bahwa Freeport tetap akan beroperasi dan tetap menikmati keuntungan dengan win win solution. “Itu bisa direncanakan sekarang sampai 2041,” tambahnya.

Hanya saja dia meminta 60 % konsentrasinya diolah di Sumbawa, dan 40 % di Gresik, karena PT. Newmont siap membangun smelter di Sumbawa. “Kalau di Gresik sudah banyak industri dan dengan diolah di Sumbawa itu untuk mengatasi kesenjangan daerah. Makanya, kita dorong hilirisasi,” ungkapnya.

Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih

## Dividen BUMN Harus Rasional

Usulan dividen yang diajukan pemerintah lewat Kementerian BUMN harus rasional dengan melihat kinerja keuangan, kebutuhan cadangan modal, dan rencana investasi. Komisi VI DPR RI segera mendalami usulan pemerintah tersebut pada rapat Panja Dividen.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman mengemukakan hal tersebut usai memimpin rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi VI dengan para direksi BUMN dan deputi BUMN, Rabu (6/9). Usulan pemerintah soal target dividen tahun 2018 ini segera dibahas dalam konsinyering Panja Dividen 8-9 September 2017.

“Kita sedang perdalam pada konsinyering nanti. Ini sudah ada usulan dari pemerintah, tapi apakah

rasionalitasnya cocok untuk kepentingan BUMN tersebut, sebab ada aturan yang sudah ditetapkan UU mengenai besaran dividen. Kita akan tanya pada para direksi dan deputi, apakah rasionalitasnya sudah sesuai. Pada konsinyering akan lebih lengkap. Ini baru informasi awal,” papar Azam.

Setoran dividen, lanjut Anggota F-PD ini, tidak setiap tahun bisa dinaikkan, karena harus melihat kondisi masing-masing BUMN. Pemerintah memang butuh dana. Tetapi rasionalitasnya juga harus dilihat. BUMN butuh cadangan dana untuk



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman

atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 % divestasi saham PT. Freeport tersebut. Hanya saja dia berharap pemerintah pusat melibatkan rakyat Papua.

“DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 %,” tegas Charles di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (31/8).

Selama ini kata Charles, pemerintah seperti tersandera dengan kontrak karya (KK) yang menjadi pegangan PT. Freeport. Tapi, kini dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan BUMD dan Pemda.

“Saya berharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi ketergantungan Papua terhadap dana transfer daerah,” jelasnya.

Otonomi daerah khusus (Otsus) pun kata Charles, akan selesai sampai 2021. Hal itu sekaligus untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri.

“Jadi, dengan 51 % divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah. Misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestitasi saham freeport itu bisa mencapai 100 % nantinya,” pungkasnya. ■

(sc), Foto: andri/hr

mengembangkan dan mempertahankan usahanya. “Jangan sampai cadangan dana BUMN itu tidak tercapai lalu tetap harus setor dividen kepada pemerintah. Akibatnya, perusahaan BUMN jadi lemah. Cadangan itu penting untuk pertumbuhan perseroan,” kilah Azam.

BUMN yang tidak punya kemampuan, sebaiknya tidak ditarik dividen terlalu besar. Komisi VI pun akan membicarakan lagi dengan pemerintah soal BUMN yang tak punya kemampuan memberi dividen. “Mungkin ada yang perlu dinaikkan dan diturunkan. Ada patokan rasionalitasnya terhadap cadangan yang harus disisihkan, ungkap politisi dari dapil Jatim III itu. ■

(mh-sc), foto: jayadil/hr

## Panja SN Dikti Komisi X Gelar RDPU Dengan Para Rektor

Panja Standarisasi Nasional (SN) Dikti Komisi X DPR RI dibentuk sebagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi. Secara normatif SN Dikti dimaksudkan agar Perguruan Tinggi di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang punya kompeten dan mempunyai daya saing dengan yang lain.

**K**endati demikian sejumlah persoalan terkait dengan daya dorong SN Dikti masih banyak mengalami kendala dan permasalahan. Diantaranya, adanya disparitas mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di sejumlah Perguruan Tinggi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin RDPU Komisi X DPR dengan beberapa Rektor dari Universitas Pasundan, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas katolik Parahiyangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

“Kemampuan mayoritas Perguruan Tinggi di Indonesia dalam memenuhi SN Dikti, termasuk akreditasi yang hingga saat ini masih tidak merata. Pengembangan SN Dikti seringkali terkendala dengan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan dari masing-masing Perguruan Tinggi. Pengembangan sarana dan prasarana hingga saat ini belum diarahkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan penelitian-penelitian strategis dan unggulan,” ucap Ferdi.

Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan lainnya adalah masih lambannya perkembangan akademik, serta rendahnya daya perbaikan program studi, kurikulum dan akselerasi strategis dimasing-masing program studi untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan industri baik di lokal, internasional, maupun global.

“Panja SN Dikti Komisi X DPR RI ingin memetakan kekuatan dan kelemahan dasar hukum yang terkait dengan perumusan pelaksanaan SN Dikti, mengkaji secara holistik dan komprehensif fungsi dan peran SN Dikti dalam menopang peningkatan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi,” jelas politisi F-Golkar itu.

Ferdi menyatakan, Panja SN Dikti Komisi X DPR juga bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual SDM, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. “Kita ingin merumuskan kebijakan SN Dikti yang berbasis pada Tri darma Perguruan Tinggi yang kompetibel dan aplikatif serta responsif terhadap beragam kondisi Perguruan Tinggi di Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, industri dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta merumuskan kebijakan-kebijakan SN Dikti yang mampu meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Indonesia, baik level nasional, internasional, maupun global,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto : Arie/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

## Komisi V Sayangkan Pencabutan PerMen Taksi Online



Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis dan Pimpinan Komisi V DPR

Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis menyayangkan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh Mahkamah Agung (MA).

“Sangat disayangkan, peraturan yang sudah dibuat kajian, sudah lama disosialisasikan dan sudah melalui uji publik dengan melibatkan semua komponen termasuk dari aparat hukum (yang merupakan perintah presiden untuk melakukan kordinasi), namun kemudian dicabut oleh MA. Tapi ini bukan yang pertama, saat Menteri Jonan juga pernah terjadi hal yang sama. Dengan cepat Presiden mencabut peraturan tersebut. Saat ini terjadi lagi lewat putusan MA,” ujar Farry usai rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan Jakarta (6/9).

Walau peraturan tersebut masih terus berlaku sampai bulan November mendatang, namun Farry menilai akan terjadi kevakuman hukum saat itu. Oleh karena itu pihaknya meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan suatu kajian yang betul-betul komprehensif. Sehingga tidak akan lagi terjadi benturan-benturan seperti yang dua tahun terakhir ini.

“Keluarnya PM (peraturan menteri) itu kan sejatinya untuk meminimalisir persoalan yang terkait transportasi online, dan ketika sampai November mendatang belum ada aturan baru, sementara PM tersebut telah dicabut oleh MA, maka akan terjadi sebuah kevakuman hukum. Di sini kami menanyakan apakah perlu revisi UU Lalulintas untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut.

Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu, Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Majelis Hakim Supandi dan Is Sudaryono dan M Hary Djatmiko sebagai anggota, mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub tersebut dikenal dengan Permenhub Taksi Online karena mengatur tentang angkutan umum berbasis online tersebut.

Hal itu ditandai dengan putusan MA No. 37P/HUM/2017. Adapun pemohon uji materi Permenhub 26 Tahun 2017 adalah enam orang pengemudi angkutan yakni Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Suanto, Iwanto, IR Johannes Bayu Saryo Aji, dan Antonius Handiyo. Empat belas pasal yang dicabut MA itu meliputi aturan tarif, wilayah operasional, dan status taksi online. ■



Anggota DPR RI Sareh Wiyono Bagikan Ribuan Daging Kurban

Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah, anggota DPR RI Sareh Wiyono membagikan ribuan paket daging kurban untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

**K**hususnya, bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, para jompo dan kaum duafa. Sareh, sapaan akrab Sareh Wiyono, bahkan turun langsung hingga ke kampung-kampung terpencil, untuk menyerahkan langsung paket daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan usai sholat Idul Adha, Jumat (1/9).

Bertempat di Rumah Aspirasi miliknya,



## Idul Adha Sareh Wiyono Bagikan Ribuan Paket Daging Kurban

politisi Partai Gerindra ini menyerahkan tiga ekor sapi jenis brahman yang rata-rata seberat 500 kilogram dan satu ekor kambing untuk disembelih.

“Salah satu ayat yang menyampaikan pesan kepada umat Islam untuk berkorban adalah dalam surat Al-Kautsar ayat 2: Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah”, jadi ini merupakan perintah agama, dan dalam pelaksanaannya sekaligus untuk kepentingan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sareh, di sela kegiatan pematangan hewan kurban.

Uniknya, ia membagikan paket daging tersebut dengan bumbunya sekaligus, sehingga masyarakat miskin bisa langsung memasaknya di rumah masing-

masing, tanpa perlu sibuk mencari bumbu lagi.

Nenny Wiyono istri Sareh dan putranya Bimantoro Wiyono turut serta dalam pembagian daging kurban tersebut. Secara simbolis keluarga Sareh menyerahkannya kepada panitia pematangan hewan kurban. Beberapa perkampungan yang disinggahi Sareh diantaranya Dusun Watudakon, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Tiga dusun lainnya yang juga disinggahinya adalah Dusun Manyung, Desa Bagorkulon, Bagor, dan Desa Lumpanguwik, Kecamatan Jatikalén.

Di Dusun Watudakon, misalnya, politisi dari dapil Jatim VIII ini, tak segan menyerahkan satu per satu paket daging kepada warga setempat, yang dihuni

sekitar 17 KK. Hampir semuanya hidup di bawah garis kemiskinan. “Saya prihatin, masih ada masyarakat di Nganjuk yang hidup kesusahan. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkab Nganjuk,” sentil Sareh yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Selanjutnya Sareh mengunjungi wilayah terpencil di Kampung Magersaren, Dusun Manyung, Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagor. Di sini ada 58 KK yang rata-rata hidup pas-pasan. Sebagian diketahui adalah eks-transmigran Aceh yang kembali ke tanah kelahiran di Nganjuk. “Alhamdulillah, baru kali ini ada pejabat yang peduli dan datang langsung ke kampung kami. Matur nuwun,” ujar Lamati, 65, salah satu warga penerima paket daging kurban. ■

# Momentum Idul Adha Tingkatkan Ketaqwaan kepada Allah SWT



Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri penyembelihan hewan kurban di Komplek Parlemen Senayan



Ketua DPR Setya Novanto berharap, momentum ibadah kurban kali ini bisa meningkatkan iman dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Selain itu juga momen bahagia ini akan mempererat tali silaturahmi segenap keluarga besar DPR, MPR dan DPD maupun masyarakat sekitar Komplek DPR Senayan ini.

**H**arapan tersebut disampaikan Ketua DPR Setya Novanto saat menyampaikan sambutan penyerahan hewan korban di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Sabtu (2/9). Pada hari raya kurban ini, di Komplek DPR Senayan disembelih 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing super dari Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, keluarga almarhum Taufik Kiemas dan dari F-PG dan F-PPP DPR.

Novanto dalam kesempatan ini menyampaikan Selamat Idul Adha 1438 Hijriah, dimana sering disebut Hari Raya Haji karena berkaitan dengan ibadah haji. Dimana saudara-saudara muslim kita dari seluruh dunia sedang menunaikan ibadah haji. Kepada para Jemaah haji tersebut, Ketua DPR mendoakan semoga mereka yang diberi kemampuan dan dikarunia haji yang mabrur

Hikmah yang bisa dipetik dari Idul Kurban, menurut Novanto tidak lain bukti ketaatan kepada Allah SWT dari seorang Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintahnya menyembelih putranya Nabi Ismail. Dengan ketaatannya maka Allah mengganti dengan seekor kambing gibas.

Selanjutnya kata Novanto, daging kurban itu akan dibagikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar sehingga membawa berkah khususnya kepada fakir miskin. Artinya hewan kurban ini juga memberi arti dan memberi manfaat bagi orang-orang yang tidak mampu. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Tamamudin dan secara khusus kepada Korpri Setjen MPR, DPR dan DPD serta pengurus masjid Baiturrahman dan segenap panitia yang telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban pagi hari ini. ■

(mp) Foto: Jeyradilhr



Suasana silaturahmi Pansus Angket KPK dengan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie di Gedung ICMI, Jakarta Selatan. (foto: iwan)



Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjadi narasumber dalam acara diskusi publik bertema "Hak Angket KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapol), di Gedung FISIP, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. (Foto: Doeh)



Sekretariat Jenderal DPR RI diwakili Deputy Administrasi Mardian Umar dan Inspektur I Irtama Dewi Barlianta mengadakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Gedung Setjen DPR. (foto: runi)